

Nomor Publikasi: 64741.1401

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG TAHUN 2013



<http://bontangkota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BONTANG



# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG 2013**

Nomor Katalog : 1413.6474

Nomor Publikasi : 64745. 1405

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan  
Analisis Statistik  
Badan Pusat Statistik Kota  
Bontang

Diterbitkan Oleh : BPS Kota Bontang

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya



# KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat, anugerah serta Karunia-Nya yang melimpah sehingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang Tahun 2013 dapat kembali diterbitkan.

Publikasi ini merupakan publikasi berkelanjutan dari tahun sebelumnya yang disusun sebagai kerangka perencanaan dengan memanfaatkan paradigma pembangunan manusia sebagai titik strategis dalam pembangunan. Diharapkan publikasi ini dapat berfungsi sebagai input di dalam perencanaan, penyusunan kebijakan pemerintah Kota Bontang, dan "Terwujudnya Masyarakat Bontang yang berbudi luhur, maju adil dan sejahtera".

Semoga publikasi ini bermanfaat, terutama untuk keperluan evaluasi dan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bontang. Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan data dan pinak-pihak yang terkait dalam penyusunan publikasi ini sehingga dapat diterbitkan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Bontang, September 2014  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Bontang,

**Drs. H. Basiran Suwandi**  
NIP. 19601005 198203 1 004

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Grafik.....	vi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	5
1.3 Fungsi, Lingkup Dan Keterbatasan.....	7
Bab 2 Formula Dan Metode Perhitungan.....	11
2.1 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia....	11
2.2 Indikator Yang Digunakan.....	12
2.2.1 Kesehatan .....	12
2.2.2 Pengetahuan .....	14
2.2.3 Standar Hidup Layak .....	16
2.3 Rumus Umum IPM .....	22
2.4 Reduksi <i>Shortfall</i> (Kecepatan Perubahan IPM)	29
2.5 Tingkatan Status Pembangunan Manusia .....	31
Bab 3 Gambaran Umum Kota Bontang .....	32
3.1 Kondisi Umum Wilayah.....	32
3.2 Kondisi Sosial .....	33
3.2.1 Kependudukan.....	33
3.2.2 Gambaran Pendidikan .....	37
3.2.3 Gambaran Kesehatan.....	47

3.2.4	Gambaran Ketenagakerjaan .....	53
3.2.5	Gambaran Perekonomian .....	62
Bab 4	Status Pembangunan Manusia .....	72
4.1	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang .	73
4.1.1	Angka Harapan Hidup.....	75
4.1.2	Angka Melek Huruf .....	77
4.1.3	Rata-Rata Lama Sekolah .....	81
4.1.4	Rata-Rata Pengeluaran Riil .....	83
4.2	Perkembangan IPM 10 Tahun Terakhir .....	87
4.3	Kecepatan Mencapai Angka IPM Ideal (Reduksi <i>Shortfall</i> ).....	89
4.4	Keterbandingan IPM Antar Kab/Kota Di Provinsi Kaltim dan Kaltara .....	91
Bab 5	Penutup.....	97
5.1	Kesimpulan.....	97
5.2	Saran.....	100

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konversi Lamanya Sekolah dari Jenjang Tertinggi yang Ditamatkan.....	16
Tabel 2. Daftar Komponen Kualitas Untuk Menghitung Indeks Kualitas Rumah .....	18
Tabel 3. Daftar Komoditas Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP) .....	21
Tabel 4. Nilai Ekstrim Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yang Digunakan Dalam Penghitungan .....	28
Tabel 5. Kriteria Tingkatan Status Pembangunan Manusia.....	31
Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kota Bontang Tahun 2008—2013.....	34
Tabel 7. Struktur Umur Penduduk dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) Kota Bontang Tahun 2008—2013.....	36
Tabel 8. Jumlah Sekolah di Kota Bontang Tahun 2009—2013.....	40
Tabel 9. Rasio Murid – Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010—2013 .....	42
Tabel 10. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2008—2013 .....	44
Tabel 11. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, dan SMU/SMK Kota Bontang, Tahun 2013.....	46



Tabel 12. Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang Dimiliki oleh Setiap Penduduk Wanita Kota Bontang yang Pernah Menikah, Tahun 2009—2013.....	51
Tabel 13. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, Tahun 2012—2013.....	53
Tabel 14. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) Kota Bontang Tahun 2008—2013.....	55
Tabel 15. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2011—2013.....	57
Tabel 16. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Bontang Tahun 2011—2013 .....	60
Tabel 17. Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2008—2013 .....	63
Tabel 19. Indikator Pembangunan Manusia Kota Bontang, Tahun 2010—2013.....	87
Tabel 20. Perbandingan Reduksi <i>Shortfall</i> IPM Kabupaten/Kota, Tahun 2013.....	89
Tabel 21. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kaltim dan Kaltara Dirinci menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013.....	95

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Bontang Tahun 2008—2013 .....	35
Grafik 2. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke Atas) Kota Bontang Tahun 2008—2013 .....	56
Grafik 3. Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008—2013 (persen) .....	66
Grafik 4. Struktur Perekonomian Kota Bontang Dengan Migas Tahun 2013 .....	68
Grafik 5. Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2013 .....	69
Grafik 6. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kaltim dan Kaltara, Tahun 2012—2013 (tahun) .....	76
Grafik 7. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Kaltim dan Kaltara, Tahun 2013 (persen).....	79
Grafik 8. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kaltim dan Kaltara, Tahun 2013 (Tahun) .....	82
Grafik 9. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Kabupaten/Kota di Kaltim dan Kaltara, Tahun 2013 (000 Rupiah) .....	84
Grafik 10. Perkembangan IPM Kota Bontang, Tahun 2004—2013 (tahun) .....	88
Grafik 11. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kaltim dan Kaltara, Tahun 2012—2013.....	92

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri atas empat komponen utama, yaitu sebagai berikut.

1. Produktivitas

Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian pembangunan manusia.

## 2. Ekuitas

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan itu.

## 3. Kestinambungan

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, dan lingkungan hidup, harus dilengkapi.

## 4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan,

kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu jender. Dengan demikian, pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Publikasi *Human Development Report* (HDR) yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, nasional, maupun daerah, yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Dengan demikian harus ada peningkatan cara pandang yang dulunya pembangunan di Indonesia hanya dilihat dari peningkatan bidang ekonomi semata, juga ke arah pembangunan manusia melalui strategi pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan manusia (*human development*) didefinisikan sebagai perluasan pilihan-pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia harus dipacu untuk menjadi semacam model

pembangunan dimana penduduk merupakan sasaran utama untuk dikembangkan dan ditingkatkan kualitas hidupnya. Di antaranya berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya, sehingga dapat diciptakan peluang kerja melalui perluasan dan produktivitas (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri sehingga penduduk diberdayakan dalam menentukan harkat martabat manusia pada partisipasi pembangunan. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan ketrampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/keterampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas pengertiannya jika dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan dan pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Model pembangunan manusia adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep lebih luas dari pada model dengan pendekatan pembangunan SDM, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan. Konsep pembangunan manusia lebih komprehensif dan bersifat holistik.

Pilihan kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu.

Namun di antara sejumlah pilihan ini, ada tiga pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu, pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang, pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan pilihan untuk mempunyai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak (*a decent standard of living*). Apabila ketiga pilihan mendasar tersebut dapat dipenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan menangkap peluang yang ada untuk meningkatkan kehidupannya.

Agar konsep pembangunan manusia dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan, maka pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Sejak tahun 1990 *United Nations* (PBB) telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai alat untuk mengukur/mengontrol pembangunan manusia melalui suatu model untuk melihat pemberdayaan manusia.

## 1.2 TUJUAN

Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), IPM dipakai untuk

melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. IPM merupakan indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan perbandingan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya di Kota Bontang tahun 2013.

Penghitungan indeks pembangunan manusia sampai ke tingkat kabupaten/kota adalah sangat penting karena proses desentralisasi (otonomi daerah) yang sedang berjalan di Indonesia saat ini merupakan pemindahan sebagian besar proses pembangunan dari pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Untuk itu tentunya dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi setempat (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi) dengan dukungan data-data yang lebih memadai untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penghitungan IPM 2013 merupakan pemutahiran data IPM tahun 2012, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih terarah pada keadaan pembangunan manusia terkini di kota Bontang. Penghitungan IPM 2013 juga berguna untuk melihat capaian pembangunan manusia di Kota Bontang pada tahun 2013 dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan perumusan arah kebijakan oleh pemerintah, sehingga diharapkan kebijakan yang



diambil akan lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

### **1.3 FUNGSI, LINGKUP DAN KETERBATASAN**

IPM adalah indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. IPM mencoba menggambarkan pembangunan manusia atau mutu hidup ke dalam suatu angka indeks. Merupakan suatu kemustahilan jika pembangunan manusia dalam arti luas dapat diukur hanya dengan suatu indeks komposit, tak peduli berapa banyak komponen indikatornya (apalagi mengingat bahwa makin banyak variabel yang dimasukkan ke dalam indeks komposit, makin besar pula kemungkinan *error* yang dapat ditimbulkan).

IPM juga masih memiliki kelemahan lain yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data, kelemahannya terletak pada definisi/konsep dan kualitas data yang digunakan antar daerah maupun antar negara sangat beragam, sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding di tingkat internasional. IPM juga membutuhkan indikator yang kuantitatif, sehingga untuk

beberapa hal IPM mempunyai kelemahan karena tidak mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan output ketiga komponen di sebuah negara berkembang. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual.

Akan tetapi di balik kelemahannya, fungsi IPM sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan manusia telah diakui secara luas. *Statistical Institute for Asia and The Pasific* (SIAP) merekomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM sebagai alat perbandingan antar wilayah di dalam suatu negara, karena pada umumnya definisi/konsep sistem perstatistikan wilayah-wilayah dalam satu negara relatif sama sehingga kualitas data yang dihasilkan pun sama.

Setelah diperkenalkannya IPM pada tahun 1990, pada tahun 1995 UNDP memperkenalkan dua jenis indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan jender yaitu (1) *Gender Related Development Index* (GDI) atau indeks pembangunan jender (IPJ); dan (2) *Gender Emporment Measure* (GEM) atau indeks pemberdayaan jender (IDJ). IPJ seperti halnya IPM merupakan suatu indeks komposit yang diharapkan dapat merefleksikan capaian upaya keseluruhan pembangunan manusia. Berbeda dengan IPM,

penghitungan IPJ memperhatikan ketidaksamaan jender. Telah diakui secara luas bahwa suatu faktor krusial bagi keberhasilan upaya pembangunan manusia adalah pemberdayaan jender. Sebagai upaya agar faktor tersebut dapat dilihat maka UNDP mengembangkan IDJ. Indeks komposit ini menggunakan variabel yang secara eksplisit mengukur pemberdayaan relatif laki-laki dan wanita dalam wilayah aktivitas politik dan ekonomi.

HDI dan ukuran-ukuran lain yang telah dikemukakan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia secara rata-rata, tetapi tidak mengukur kesenjangan manusia (*human deprivations*). Untuk mengisi kesenjangan ini, pada tahun 1997 UNDP memperkenalkan indeks kemiskinan manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI). Indeks ini mencoba mengungkap deprivasi yang terjadi. Komponen IKM adalah (1) persentase penduduk yang tidak mampu bertahan hidup (meninggal) hingga umur 40 tahun sebagai refleksi dari deprivasi hidup sehat dan panjang umur; (2) persentase penduduk dewasa yang buta huruf sebagai refleksi dari deprivasi di bidang pendidikan, dan (3) akses kepada pembangunan kesehatan, air bersih dan persentase balita yang kurang gizi. Indeks komposit dari ketiganya mewakili deprivasi dari keseluruhan yang terkait dengan ekonomi. Bila IPM mengukur pencapaian

rata-rata pada setiap kompenennya, maka IKM mengukur *magnitude* (arah) dan deprivasi (kesenjangan).

Dengan diterbitkannya *Human Development Report* (HDR) – *Human Development Index* (HDI) oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain oleh kesederhanaan metode penghitungannya, bersifat global, tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu benar-benar diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Apalagi kalau dana daerah otonom tersebut sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien mungkin. Oleh karena itu kehadiran HDR dan HDI menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di kabupaten/kota.

# **BAB 2**

## **FORMULA DAN METODE PERHITUNGAN**

### **2.1 PENGUKURAN IPM**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang Nobel dari India, Amartya Sen, dan seorang ekonom Pakistan, Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University, dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna

dari pada hanya sekedar pendapatan per kapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih rinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia.

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan dikombinasikan dengan rata-rata lama sekolah (bobot satu per tiga).
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritansi daya beli.

## **2.2 INDIKATOR YANG DIGUNAKAN**

### **2.2.1 KESEHATAN**

Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, maka UNDP memilih indikator Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir, yang biasa dinotasikan  $e_0$  yaitu rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh

sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika pola mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa yang akan datang. Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, yaitu makin tinggi angka kematian bayi maka nilai AHH akan makin menurun.

Perhitungan  $e_0$  dapat dilakukan dengan bantuan *life table*, namun hal ini belum dapat dilakukan di Indonesia. Sistem registrasi penduduk yang belum dikelola secara baik dan berkesinambungan mengakibatkan data yang dibutuhkan yaitu data kematian menurut kelompok umur tidak tersedia. Oleh karena itu ditempuh alternatif lain yaitu perhitungan secara tidak langsung dengan menggunakan angka proyeksi dari series data  $e_0$  yang dihitung berdasarkan data Sensus Penduduk 2000 dan Sensus Penduduk 2010. Metode ini menggunakan dua variabel yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*life birth*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) untuk setiap wanita berusia 15-49 tahun menurut kelompok umur 5 tahunan. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh tujuh estimasi  $e_0$  untuk rujukan waktu yang berbeda dari setiap sumber data sehingga diperoleh angka estimasi  $e_0$  yang dijadikan dasar penghitungan proyeksi.

Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi

lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain. Oleh karena hal tersebut di atas, maka AHH sudah cukup representatif digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan.

### **2.2.2 PENGETAHUAN**

Untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan dua indikator yaitu Angka Melek Huruf (AMH/Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dengan perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk MYS. Keabsahan muka (*face validity*) kedua indikator ini jarang dipertanyakan. Yang sering dipertanyakan adalah kepekaan Lit sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah di Indonesia. Walaupun demikian BPS tetap mempertahankan indikator itu karena dua alasan. Pertama, ketika digunakan untuk menghitung IPM pada tingkat kabupaten/kota ternyata indikator ini masih cukup peka. Kedua, UNDP sampai saat ini masih menggunakan indikator itu sehingga dinilai masih ada baiknya digunakan untuk kepentingan perbandingan internasional. Secara teori, sebenarnya UNDP tidak lagi menggunakan MYS sebagai komponen IPM dan diganti dengan angka partisipasi sekolah (APS). Namun alasan



yang dikemukakan mengapa masih menggunakan indikator tersebut adalah kesulitan pengumpulan data secara internasional, bukan alasan yang substansial. Secara substansial, MYS yang merupakan indikator dampak diakui lebih unggul dari pada APS yang merupakan indikator proses sebagai komponen IPM. Dengan alasan itu BPS tetap menggunakan MYS sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Angka Melek Huruf merupakan indikator yang menggambarkan kualitas dasar sumber daya manusia. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Sebagai catatan, indikator ini tidak terlalu peka dalam menggambarkan variasi antar provinsi, dampak kelemahan tersebut berkurang dengan memasukkan MYS dalam penghitungan rata-rata indeks pendidikan (IP) yang menurut UNDP dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{IP} = 2/3 \text{ Indeks Lit} + 1/3 \text{ Indeks MYS}$$

Rata-rata lamanya sekolah (MYS) merupakan ukuran yang lebih nyata dalam mengukur kualitas sumber daya manusia. Indikator ini merupakan kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh seseorang dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai

jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah diduduki. Lamanya sekolah dikonversi dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Konversi Lamanya Sekolah dari Jenjang Tertinggi yang Ditamatkan**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Lamanya Sekolah (tahun)
(1)	(2)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0
2. Sekolah Dasar	6
3. SLTP	9
4. SLTA	12
5. Diploma I/II	13/14
6. Akademi/Diploma III	15
7. Diploma IV/Sarjana	16
8. S2/S3	18/21

### **2.2.3 STANDAR HIDUP LAYAK**

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP*

*per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara/wilayah/region.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

- ◆ Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A) .
- ◆ Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota propinsi yang sesuai (=B).
- ◆ Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara. Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditas yang terdiri dari nilai 27 komoditas yang diperoleh dari Susenas Modul (Tabel 3).
- ◆ Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
- ◆ Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

$$\text{PPP / unit} = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j (P_{(g,j)} \cdot q_{(i,j)})}$$

- dimana,
- $E_{(i,j)}$  : pengeluaran untuk komoditas j di propinsi ke-i
  - $P_{(g,j)}$  : harga komoditas j di DKI Jakarta
  - $q_{(i,j)}$  : jumlah komoditas j (unit) yang dikonsumsi di propinsi ke-i

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk oleh tujuh komponen kualitas tempat tinggal dan diperoleh dari Susenas Kor. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut.

**Tabel 2. Daftar Komponen Kualitas Untuk Menghitung Indeks Kualitas Rumah**

Komponen	Kualitas		Skor	
	A	B	A	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lantai	Keramik marmer atau granit	Lainnya	1	0

Komponen	Kualitas		Skor	
	A	B	A	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Luas lantai per kapita	$\geq 10 \text{ m}^2$	Lainnya	1	0
Dinding	Tembok	Lainnya	1	0
Atap	Kayu/sirap, beton	Lainnya	1	0
Fasilitas penerangan	Listrik	Lainnya	1	0
Fasilitas air minum	Leding	Lainnya	1	0
Jamban	Milik sendiri	Lainnya	1	0
Catatan : Skor awal untuk setiap rumah = 1				

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah  $6/8$  atau 0,75 unit.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 C_{(i)}^* &= C_{(i)} && \text{Jika } C_{(i)} \leq Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{Jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{Jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{Jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z
 \end{aligned}$$

dimana,

$C_{(i)}$  = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

$Z$  = *Threshold* atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai  $Z$  ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 547.500,- per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per kapita per hari.

**Tabel 3. Daftar Komoditas Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)**

<b>Komoditas</b>	<b>Satuan</b>	<b>Proporsi Terhadap Konsumsi Total</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Beras Lokal	Kg	7,25
2. Tepung Terigu	Kg	0,10
3. Singkong	Kg	0,22
4. Tuna/Cakalang	Kg	0,50
5. Teri	Ons	0,32
6. Daging Sapi	Kg	0,78
7. Daging Ayam	Kg	0,65
8. Telur	Butir	1,48
9. Susu Kental Manis	397 gram	0,48
10 Bayam	Kg	0,30
11. Kacang Panjang	Kg	0,32
12. kacang Tanah	Kg	0,22
13. Tempe	Kg	0,79
14. Jeruk	Kg	0,39
15. Pepaya	Kg	0,18
16. Kelapa	Butir	0,56
17. Gula	Ons	1,61
18. Kopi	Ons	0,60

Komoditas	Satuan	Proporsi Terhadap Konsumsi Total
(1)	(2)	(3)
19. Garam	Ons	0,15
20. Merica	Ons	0,13
21. Mie Instant	80 gram	0,79
22. Rokok Kretek	10 batang	2,86
23. Listrik	Kwh	2,06
24. Air Minum	Kubik	0,46
25. Bensin	Liter	1,02
26. Minyak Tanah	Liter	1,74
27. Sewa Rumah	Unit	11,56
<b>Total</b>		<b>37,52</b>

) Berdasarkan data SUSENAS 1996

## 2.3 RUMUS UMUM IPM

Dalam penghitungan IPM terdapat 3 (tiga) macam versi, yaitu IPM I, IPM II, dan IPM III. Perbedaan versi hanyalah berdasarkan sumber pembentuk IPM, baik lembaga maupun indikator yang digunakan. Versi IPM I menggunakan model PPT-LIPI dengan berdasarkan pada indikator inti. Versi IPM II menggunakan model PPT-LIPI yang merupakan



gabungan antara indikator inti dan indikator sektoral. Versi IPM III menggunakan model UNDP 1990.

### 1. Versi IPM I

Versi ini menggunakan pendekatan hasil (output), yang meliputi 3 indikator (indikator inti), yaitu angka harapan hidup, pendidikan tamat SD ke atas, dan pendapatan per kapita/pengeluaran per kapita.

Dirumuskan sebagai berikut :

Pembakuan:

$$\text{bak } X_i = \frac{X_i - \text{BB}}{\text{CI}} + \text{Score}$$

dimana:

bak  $X_i$  = nilai indikator hasil pembakuan

$X_i$  = indikator yang akan dibakukan

BB = batas bawah daftar konversi

CI = jarak interval

Penghitungan IPM I:

$$\text{IPM I} = \frac{X_h + X_p + X_e}{3}$$

dimana:

$X_h$  = nilai angka harapan hidup setelah dibakukan

$X_p$  = nilai pendidikan tamat SD ke atas setelah dibakukan

$X_e$  = nilai pendapatan/pengeluaran per kapita dibakukan

Hasil perhitungan IPM I berkisar antara 1 sampai 10. IPM dikatakan paling baik atau tinggi apabila mendekati nilai 10. Sebaliknya dikatakan IPM paling jelek atau rendah apabila mendekati angka 1.

## 2. *Versi IPM II*

Versi ini menggunakan gabungan pendekatan masukan (indikator sektoral) dan pendekatan hasil (indikator inti). Sebelum menghitung IPM II ini masing-masing indikator dibakukan dengan menggunakan formula seperti pada versi IPM I. Kemudian untuk menghitung indeks, perlu dilakukan pembobotan. Indikator inti dianggap lebih penting daripada indikator sektoral, maka diberi bobot sebesar 1,5.

Penghitungan IPM II sebagai berikut:

$$\text{IPM II} = \frac{(\text{NI} \times 1,5) + (\text{NS})}{2,5}$$

dimana:

- NI = nilai rata-rata indikator inti
- 1,5 = angka pembobotan indikator inti
- NS = nilai rata-rata indikator sektoral
- 2,5 = pembagi rata-rata

Hasil perhitungan IPM II juga berkisar antara 1 sampai 10. IPM dikatakan paling baik atau tinggi apabila

mendekati nilai 10 (sempurna). Sebaliknya IPM dikatakan paling rendah apabila mendekati angka 1.

### 3. *Versi IPM III*

Versi ini menggunakan pendekatan hasil (output) dan formula yang dipakai dalam model UNDP 1990, dengan melalui penghitungan beberapa tahapan. Tahap pertama menentukan nilai deprivasi dari tiga indikator dasar, yaitu angka harapan hidup, tingkat literasi, dan pendapatan per kapita. Nilai maksimum dan minimum ditentukan untuk setiap indikator. Nilai maksimum menunjukkan tingkat keterbelakangan secara relatif dan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{pj} = \frac{\text{maks } X_j - X_{pj}}{\text{Maks } X_j - \text{min } X_j}$$

Dimana :

$I_{pj}$  = indeks deprivasi

$p$  = kabupaten/kota 1,2,...,n

$j$  = indikator 1,2,3

$X_{pj}$  = nilai indikator untuk kabupaten/kota

$\text{Maks } X_j$  = nilai maksimum indikator yg dicapai

$\text{Min } X_j$  = nilai minimum indikator yang dicapai

Tahap kedua menentukan rata-rata deprivasi dari tiga nilai indikator di atas, dengan rumus yaitu:

$$I_p = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 I_{pj} \quad j = 1,2,3$$

Tahap ketiga adalah menghitung IPM III dengan cara sebagai berikut:

Penghitungan IPM III:

$$IPM \text{ III} = \frac{X_h + X_p + X_e}{3}$$

Hasil perhitungan IPM III berkisar antara 0 sampai 100. IPM dikatakan paling baik atau tinggi apabila mendekati angka 100. Sebaliknya IPM dikatakan paling jelek atau rendah apabila mendekati angka 0.

Indeks yang dihasilkan kemudian dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut.

$$I_{(i)} = \frac{[X_{(i)} - \text{Min}.X_{(i)}]}{[\text{Max}.X_{(i)} - \text{Min}.X_{(i)}]}$$

$$IPM = \frac{1}{3} \sum_i I_{(i)}$$

dimana :  $I_{(i)}$  = Indeks komponen IPM ke-i

$X_{(i)}$	= Nilai komponen IPM ke-i
Max. $X_{(i)}$	= Nilai komponen IPM ke-i yang tertinggi
Min. $X_{(i)}$	= Nilai komponen IPM ke-i yang terendah
i	= 1, 2, 3

Dalam studi ini, nilai ekstrim yang digunakan untuk  $e_0$ , Lit dan MYS adalah nilai yang telah ditetapkan oleh UNDP (1990), sehingga nilai indeks untuk masing-masing komponen tersebut dapat dibandingkan secara internasional. Sedangkan nilai ekstrim untuk komponen PPP ditentukan sebagai berikut.

- (1) Nilai minimum adalah nilai PPP provinsi terendah pada tahun 1999, dan
- (2) Nilai maksimum adalah nilai PPP "target" yang ingin dicapai pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II oleh provinsi yang memiliki nilai PPP tertinggi pada tahun 1993.

Nilai maksimum tersebut ditetapkan 4 (empat) kali nilai PPP provinsi tertinggi pada tahun 1993, suatu nilai yang setara dengan nilai proyeksi PPP untuk provinsi tersebut pada akhir PJP II dengan asumsi tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 6 sampai 7 persen per tahun.

Jadi masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan rasio selisih antara nilai maksimum dari suatu indikator dengan nilai minimumnya. Standar nilai masing-masing komponen IPM adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. Nilai Ekstrim Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yang Digunakan Dalam Penghitungan**

Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka harapan hidup ( $e_0$ )	25	85	Standar UNDP
Angka melek huruf (Lit)	0	100	Standar UNDP
Rata-rata lama sekolah (MYS)	0	15	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
<i>Purchasing Power Parity</i> (PPP) yang disesuaikan	300.000** 356.699***	737.720*	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

- a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018 (UNDP)
- b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru tahun 2007

Keterangan :

- \*) Proyeksi pengeluaran riil per tahun untuk provinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan rumus Atkinson. Proyeksi ini mengasumsikan kenaikan 6—7 persen per tahun selama 1993—2018.
- \*\*\*) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk provinsi yang memiliki angka terendah pada tahun 1990 digunakan untuk penghitungan IPM tahun 1996.
- \*\*\*) Nilai minimum Kota Bontang sejak 2007 disesuaikan menjadi Rp. 356.699 dikarenakan dampak krisis ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat secara drastis. Penghitungan ini berdasarkan pada garis kemiskinan tahun 2007.

## 2.4 REDUKSI *SHORTFALL* (KECEPATAN PERUBAHAN IPM)

Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan rata-rata reduksi *shortfall* per tahun. Reduksi *shortfall* adalah peningkatan nilai IPM dalam suatu periode relatif terhadap jarak nilai IPM awal periode ke IPM sasaran (=100). Nilai *shortfall* mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara

apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum.

Angka *shortfall* juga merefleksikan prestasi pencapaian dan gambaran yang terbandingkan dari kemajuan pencapaian atau kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah. Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini di dasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi.

Nilai reduksi *shortfall* juga dapat dihitung untuk masing-masing komponen IPM. Prosedur penghitungan reduksi *shortfall* IPM ( $=r$ ) dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$r = \frac{[(IPM_t) - (IPM_{ref})] \cdot 100}{(IPM_t) - (IPM_{ref})}$$

dimana :

$IPM_t$  = IPM pada tahun t

$IPM_{t+n}$  = IPM pada tahun t+n

$IPM_{ref}$  = IPM acuan atau ideal yang dalam hal ini sama dengan 100



## 2.5 TINGKATAN STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50—80), dan tinggi (80 ke atas). Sedangkan untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota, tingkatan status menengah dipecah lagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia adalah sebagai berikut.

**Tabel 5. Kriteria Tingkatan Status Pembangunan Manusia**

<b>Tingkatan Status</b>	<b>Kriteria</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Rendah	$IPM < 50$
Menengah bawah	$50 \leq IPM < 66$
Menengah atas	$66 \leq IPM < 80$
Tinggi	$IPM \geq 80$

# BAB 3

## GAMBARAN UMUM KOTA BONTANG

### 3.1 KONDISI UMUM WILAYAH

Secara geografis Kota Bontang terbentang pada 117°22' sampai 117°32' Bujur Timur serta di antara 0°01' sampai 0°112' Lintang Utara. Wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah datar, landai, dan berbukit. Luas Kota Bontang sekitar 497,57 km<sup>2</sup> yang sebagian besarnya merupakan lautan yaitu 70,29 persen dan sisanya 29,71 persen merupakan wilayah daratan atau seluas 147,8 km<sup>2</sup>.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kota Bontang dibagi secara berjenjang menjadi 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah daratan paling luas (104,40 km<sup>2</sup>), disusul oleh Kecamatan Bontang Utara (26,20 km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Bontang Barat (17,20 km<sup>2</sup>).

Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai, lalu menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999

tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Batasan administratif Kota Bontang adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

## **3.2 KONDISI SOSIAL**

### **3.2.1 KEPENDUDUKAN**

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Bontang mengalami pertumbuhan sebesar 5,85 persen jika dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu menembus angka 163.651 jiwa. Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2013 terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 85.597 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 78.054 jiwa.

Gambaran selama enam tahun terakhir menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin (RJK) penduduk Kota Bontang pada tahun 2013 adalah sekitar 110 atau dengan kata lain terdapat 110 orang penduduk laki-laki di antara 100 orang penduduk perempuan. Adapun gambaran perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 6 dan Grafik 1 di bawah ini.

**Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin, Kota Bontang Tahun 2008—2013**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	RJK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	69.427	64.085	133.512	108
2009	71.648	65.701	137.349	109
2010	75.422	68.261	143.683	110
2011	78.166	71.064	149.230	110
2012	81.245	73.359	154.604	111
2013	85.597	78.054	163.651	110

Sumber : BPS Kota Bontang

**Grafik 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kota Bontang Tahun 2008—2013**



Keberhasilan pembangunan di suatu daerah salah satunya dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, yang dicerminkan oleh makin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (usia 0—14 tahun dan usia 65 tahun ke atas), atau dengan kata lain angka beban tanggungan menurun.

Tabel 7 di bawah ini memperlihatkan bahwa penduduk usia muda (0—14 tahun) pada tahun 2013 adalah sebanyak 51.146 jiwa, atau mengalami kenaikan sebesar 3,71 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penduduk dalam kelompok umur produktif (15—64 tahun) berjumlah 110.429 jiwa, atau meningkat sebesar 6,84 persen dari tahun 2012. Sedangkan jumlah penduduk umur tua (65 tahun ke atas) pada tahun 2013 adalah sebesar 2.076 jiwa,

atau bertambah 7,45 persen dari tahun sebelumnya.

**Tabel 7. Struktur Umur Penduduk dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) Kota Bontang Tahun 2008—2013**

Tahun	Umur			RBK
	0—14 tahun	15—64 tahun	65+ tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	42.806	89.091	1.615	49,86
2009	45.111	90.890	1.348	51,12
2010	45.927	96.163	1.593	49,42
2011	50.198	97.514	1.518	53,03
2012	49.318	103.354	1.932	49,59
2013	51.146	110.429	2.076	48,20

Sumber : BPS Kota Bontang

Dengan melihat komposisi penduduk berdasarkan umur, maka dapat dihitung rasio ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu rasio yang menyatakan besarnya tanggungan penduduk kelompok umur produktif. Angka beban ketergantungan sangat penting dalam studi ekonomi, karena menunjukkan jumlah penduduk yang secara ekonomi tidak aktif per seratus

penduduk yang aktif secara ekonomi. Rasio ketergantungan pada tahun 2013 adalah sebesar 48,20 yang artinya bahwa pada tahun 2013 secara rata-rata setiap 100 orang penduduk yang berusia produktif memiliki beban tanggungan sebanyak 48 sampai 49 orang penduduk yang bukan usia produktif. Apabila dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, terjadi penurunan angka rasio ketergantungan yang menunjukkan bahwa penambahan penduduk pada kelompok umur produktif lebih cepat dari pada penambahan penduduk kelompok umur tidak/belum produktif.

### **3.2.2 GAMBARAN PENDIDIKAN**

#### **1. Prasarana Pendidikan**

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan, yang mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, makin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas pendidikan dapat pula berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian sehari-hari, pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta

memperluas wawasan.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep '*link and match*', yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan jaman. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efisiensi pengelolaan pendidikan adalah bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Rendahnya pendapatan keluarga seringkali menjadi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Realita ini senantiasa ditemui di sekeliling kita. Banyak anak yang seharusnya belajar, namun terpaksa bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga.



Kondisi ini mendorong pemerintah membuat kebijakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan bahkan berkomitmen terhadap pendidikan 12 tahun yang dilaksanakan secara gratis. Program ini telah berjalan efektif di Kota Bontang sejak tahun 2004 hingga saat ini, melalui pembiayaan APBD setiap tahun.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menunjukkan keseriusan dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan mewajibkan pendidikan 12 tahun dan mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan SMU/SMK.

Program dan kebijakan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Bontang yang berbudi luhur, maju, adil dan sejahtera. Bertujuan untuk menampung jumlah murid sebanyak-banyaknya dan berbagai program pendidikan subsidi secara merata ke seluruh sekolah dengan perhitungan yang sama. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah menginginkan agar penduduk terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar dan menengah. Upaya pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah dapat terlihat pada Tabel 8 di bawah ini, yang menunjukkan

terjadinya peningkatan jumlah sekolah, bukan hanya pada tingkat sekolah dasar namun juga pada tingkat sekolah menengah atas.

**Tabel 8. Jumlah Sekolah di Kota Bontang, Tahun 2009—2013**

Tahun	SD	SLTP	SMU/SMK /MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	55	34	19
2010	55	34	20
2011	56	34	21
2012	59	34	22
2013	60	33	25

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Salah satu indikator capaian kualitas pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH), yaitu kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat-kalimat sederhana. Pada tahun 2013 angka melek huruf Kota Bontang tercatat sebesar 99,25 persen, yang berarti bahwa Angka Buta Huruf (ABH) Kota Bontang tidak sampai 1 persen, suatu kondisi yang sangat menggembirakan yang berhasil dicapai oleh kota ini.

## 2. Rasio Murid-Guru

Indikator lain yang cukup berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia adalah rasio murid-guru, yaitu rasio yang menggambarkan ketersediaan jumlah guru atau beban kerja seorang guru dalam menangani anak didiknya. Makin rendah nilai rasio, makin banyak perhatian yang dapat dicurahkan oleh seorang guru terhadap muridnya. Sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih lancar.

Di samping itu, rasio murid-guru dapat pula digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas. makin tinggi nilai rasio dapat berarti makin rendah tingkat pengawasan/perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran pun makin rendah. Namun demikian, rasio yang terlalu rendah merupakan indikasi bahwa telah terjadi inefisiensi karena kelebihan jumlah guru. Oleh sebab itu, beban mengajar seorang guru hendaknya mendekati batas kemampuan ideal. Menurut hasil beberapa penelitian, rasio murid-guru yang ideal agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif adalah 20, yaitu seorang guru menangani sekitar 20 orang murid untuk setiap kelas.

**Tabel 9. Rasio Murid–Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010—2013**

Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
SD	19,51	18,83	21,27	18,68
SLTP	14,71	12,71	14,54	15,28
SLTA	13,25	10,54	12,17	12,10

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 rasio murid-guru masih memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu rasio terbesar adalah pada tingkat sekolah dasar, dan makin menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada tingkat SD, sekitar 18—19 orang murid ditangani oleh seorang guru. Angka ini cenderung lebih kecil apabila dibandingkan dengan rasio pada tahun 2012 yang sebesar 21,27. Sedangkan pada tingkat SLTP, terjadi peningkatan rasio murid-guru pada tahun 2013 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 15—16 orang murid di tingkat pendidikan SLTP ditangani oleh seorang guru. Sementara itu pada tingkat pendidikan SLTA terjadi peningkatan yang tidak begitu signifikan pada rasio murid-guru di Kota Bontang tahun 2013. Untuk setiap 1 orang guru di tingkat

pendidikan SLTA, terdapat sekitar 12—13 orang murid yang menjadi bebannya.

Secara umum dalam empat tahun terakhir, terlihat bahwa rasio murid-guru di Kota Bontang masih berada pada kondisi ideal. Kecukupan jumlah guru pada tingkat sekolah dasar dan menengah tersebut tentu saja menjadi suatu nilai tambah yang positif bagi pembangunan bidang pendidikan di Kota Bontang. Dalam hal ini, pencapaian Kota Bontang sudah berada di atas pencapaian nasional yang angka rasio murid sekolah dasar dan menengahnya masih berkisar antara 25—30 murid per guru (Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Fasli Jalal).

### **3. Tingkat Pendidikan Penduduk**

Selain ketersediaan guru yang mencukupi, indikator lain yang dapat dilihat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh penduduk. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, apabila dilihat menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan, terlihat bahwa struktur penduduk berusia 10 tahun ke atas di Kota Bontang tidak mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

**Tabel 10. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2008—2013**

Tahun	SD Kebawah	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat Universitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	32,80	19,99	38,00	9,22
2009	39,62	18,95	33,24	8,16
2010	31,78	19,89	38,55	9,77
2011	33,40	17,77	38,25	10,59
2012	34,22	19,14	37,32	9,31
2013	31,18	19,90	36,38	12,55

*Sumber : BPS Kota Bontang*

Jumlah penduduk yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang SLTA masih merupakan yang tertinggi, yaitu mencapai 36,38 persen dari seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Angka ini sedikit menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun (setingkat SLTP) berjumlah sekitar 19,90 persen, atau sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang berada pada level 19,14

persen. Sedangkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang sudah menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2013 adalah sebesar 31,18 persen. Peningkatan yang cukup menggembirakan terlihat pada jenjang perguruan tinggi, yaitu terjadi peningkatan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi dari sekitar 9,31 persen pada tahun 2012 menjadi sekitar 12,55 persen pada tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Kota Bontang yang makin meningkat mengenai pentingnya pendidikan dan tentu saja peningkatan ini akan berbanding lurus dengan peningkatan daya saing penduduk Kota Bontang di dunia kerja.

#### **4. Tingkat Partisipasi Sekolah**

Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah persentase jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya, APK

pada tingkat SD merupakan perbandingan jumlah murid di tingkat SD dengan jumlah penduduk yang berusia antara 7—12 tahun. Sedangkan APM adalah persentase jumlah seluruh siswa usia pada suatu jenjang pendidikan tertentu dan berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Misalnya, nilai APM tingkat SLTP adalah perbandingan antara jumlah siswa SLTP yang berusia 13—15 tahun dengan jumlah penduduk yang berusia 13—15 tahun.

**Tabel 11. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, dan SMU/SMK Kota Bontang, Tahun 2013**

Jenjang Pendidikan	APK	APM
(1)	(2)	(3)
SD	98,72	91,64
SLTP	93,84	77,01
SMU/SMK	101,05	80,62
Universitas	9,13	6,96

Sumber : BPS Kota Bontang

Pada tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan SLTA, nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bontang cukup tinggi yaitu mendekati 100 persen, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 11 di atas. Hal



tersebut mengandung makna bahwa ketersediaan sekolah di Kota Bontang mampu menampung jumlah siswa sesuai dengan target.

Pada indikator APK, kesesuaian usia siswa dengan jenjang pendidikan tidak terlihat secara jelas, karena bisa jadi ada siswa yang terlalu cepat atau justru terlambat memasuki dunia sekolah. Hal tersebut dapat diatasi dengan menyandingkan nilai APK dengan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada jenjang pendidikan SD, nilai APM Kota Bontang adalah sekitar 91,64 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa ada siswa di tingkat SD yang berusia bukan pada rentang 7—12 tahun. Sedangkan pada tingkat pendidikan SLTP dan SLTA, nilai APM Kota Bontang masing-masing adalah 77,01 persen dan 80,62 persen. Perbedaan antara nilai APK dan APM tersebut dapat dijelaskan dengan melihat fenomena orang tua yang cenderung menginginkan anak-anaknya memasuki dunia pendidikan lebih cepat dari pada jaman dulu.

### **3.2.3 GAMBARAN KESEHATAN**

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Kesehatan dapat pula dijadikan sebagai barometer kesejahteraan seseorang. Dengan alasan

tersebut, maka kesehatan dijadikan salah satu indikator pembangunan manusia. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat, terlaksananya pelayanan kesehatan yang bersifat merata, terpadu dan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat baik dilihat dari akses untuk memperoleh layanan kesehatan maupun kemampuan ekonomi masyarakat untuk belanja kesehatan. Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Mengingat pentingnya faktor kesehatan, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Upaya tersebut telah membuahkan hasil yaitu dengan tidak terputusnya Kota Bontang meraih Piala Adipura sejak tahun 2008 sampai tahun 2014. Bahkan pada tahun 2013, Kota Bontang mampu meraih Piala Adipura Kencana, yaitu sebuah anugerah tertinggi untuk kota terbersih di Indonesia dari Presiden RI. Selain itu penghargaan WTN bidang Ketertiban Lalu Lintas dan penghargaan sebagai Kota Sehat untuk kategori Swasti Saba Wistara Emas dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pun telah diraih oleh Kota Bontang.

Di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Bontang terus berupaya mewujudkan masyarakat sadar kesehatan melalui pemberian penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, pemberian ASKES GAKIN, jaminan kesehatan daerah (jamkesda) gratis, Jamkesprov, serta melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk klinik khusus pegawai pemerintah yang disebut dengan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP), serta RSUD Kota Bontang.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah di bidang kesehatan, selain penghargaan-penghargaan di atas, dapat pula dilihat melalui beberapa indikator yang dapat mengukur pencapaian pembangunan kesehatan antara lain usia harapan hidup (AHH). Pada tahun 2013, angka harapan hidup penduduk Kota Bontang mencapai 73,12 tahun, naik sekitar 0,5 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 72,78 tahun. Angka harapan hidup bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri, namun dipengaruhi oleh beberapa variabel lain di antaranya angka kesakitan, lamanya sakit, serta rasio ketersediaan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2013, prasarana kesehatan yang dimiliki oleh Kota Bontang meliputi 5 unit Rumah Sakit, 6 unit Puskesmas, 2 unit Puskesmas Pembantu, dan 4 unit Balai Pengobatan.

Derajat kesehatan masyarakat suatu daerah juga dapat diukur menggunakan indikator Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan pada perubahan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun. Seperti diketahui bahwa AKB sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi orang tua atau orang yang mengasuh, terutama kesehatan dan gizi perempuan khususnya pada masa kehamilan, melahirkan dan masa menyusui, sehingga makin baik kondisi sosial ekonomi orang tua makin besar peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup yang lebih baik serta berumur panjang. Besarnya AKB dapat mencerminkan tingkat kepedulian terhadap kesehatan perempuan. Pada dasarnya penghitungan AKB dapat diperoleh dengan menggunakan jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) melalui program *mortpak*.

Definisi Anak lahir hidup (ALH) adalah banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya sedangkan anak masih hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki oleh seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan. Perbedaan antara ALH dan

AMH merupakan jumlah anak yang meninggal. Angka ini merupakan bahan perhitungan angka harapan hidup di suatu wilayah. Tabel 12 di bawah ini menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah menikah dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup pada saat pencacahan dilaksanakan. Terlihat bahwa rata-rata jumlah anak lahir hidup yang dimiliki oleh seorang wanita yang pernah menikah di Kota Bontang adalah sekitar 2—3 orang anak. Sedangkan rata-rata anak yang masih hidup juga berkisar antara 2—3 orang, atau dengan kata lain tingkat kematian anak di Kota Bontang bisa dikatakan cukup rendah.

**Tabel 12. Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup ( ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) yang Dimiliki oleh Setiap Penduduk Wanita Kota Bontang yang Pernah Menikah, Tahun 2009—2013**

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ALH	2,42	2,40	2,45	2,63	2,40
AMH	2,17	2,35	2,36	2,47	2,30

Sumber : BPS Kota Bontang

Indikator kesehatan lainnya pada pembangunan manusia yang dapat dijadikan sebagai alat ukur adalah

angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, yang merupakan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan terhadap seluruh penduduk. Persentase penduduk Kota Bontang yang mengalami keluhan gangguan kesehatan pada tahun 2013 adalah sebesar 23,47 persen, atau menurun apabila dibandingkan dengan angka kesakitan tahun 2012 yang sebesar 27,33 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, terlihat bahwa persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan selalu lebih tinggi dari pada persentase penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan. Hal tersebut wajar mengingat bahwa perempuan memiliki resiko karena adanya proses menstruasi dan kehamilan.

Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup sehat. Salah satu upaya dari pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan yang terus ditingkatkan adalah dengan mendirikan Puskesmas Keluarga yang buka 24 jam yang menggabungkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan Upaya Kesehatan Personal (UKP) sejak 1 Januari 2012, agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah, tidak terhalang oleh jarak dan waktu.

**Tabel 13. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, Tahun 2012—2013**

Ada/tidak keluhan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2012</b>			
1. Ada keluhan	25,56	29,28	27,33
2. Tidak ada	74,44	70,72	72,67
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2013</b>			
1. Ada keluhan	22,46	24,58	23,47
2. Tidak ada	77,54	75,42	76,53
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Bontang

### **3.2.4 GAMBARAN KETENAGAKERJAAN**

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang serta memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Angkatan kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri pada dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai

subjek sekaligus objek. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan berupa pengangguran.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, khususnya penduduk yang tergolong usia kerja, sebagian dari mereka diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam perekonomian. Selain menggambarkan daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja, indikator tenaga kerja juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut sektor dan wilayah.

Tabel 14 di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk kota Bontang yang berusia 15 tahun ke atas selama kurun enam tahun terakhir. Penduduk usia kerja terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang terlibat atau sedang berusaha terlibat di dalam aktivitas ekonomi produktif. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak terlibat secara aktif dalam aktivitas ekonomi, misalnya anak sekolah, ibu rumah



tangga, orang-orang tua, dan orang-orang sakit yang sudah tidak mampu lagi bekerja.

**Tabel 14. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang Tahun 2008—2013**

Tahun	Jumlah
(1)	(2)
2008	90.706
2009	92.238
2010	97.755
2011	103.336
2012	106.249
2013	109.069

Sumber : BPS Kota Bontang

Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013 tercatat jumlah angkatan kerja di Kota Bontang sebanyak 109.069 orang, atau meningkat sekitar 2,65 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pola peningkatan angkatan kerja selama enam tahun terakhir digambarkan secara lebih jelas oleh Grafik 2 di bawah ini.

**Grafik 2. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Kota Bontang Tahun 2008—2013**



Keterlibatan penduduk di dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan membandingkan antara banyaknya penduduk yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, baik sudah bekerja maupun sedang mencari kerja/menyiapkan usaha baru, dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Perbandingan tersebut dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Makin tinggi nilai TPAK makin banyak proporsi penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Selain nilai TPAK, ukuran lain yang sering digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator TPT didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang sedang berusaha mencari

pekerjaan secara aktif dengan jumlah angkatan kerja. Lawan TPT adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kesempatan kerja memberi gambaran mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Pertambahan dan pengurangan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dipengaruhi oleh dinamika struktur umur penduduk, jenis kelamin, struktur ekonomi, dan migrasi. Makin besar nilai TPT maka makin besar pengurangan kesempatan kerja dan begitu sebaliknya. Perkembangan nilai TPAK dan TPT Kota Bontang diperlihatkan oleh Tabel 15 di bawah ini.

**Tabel 15. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2011—2013**

Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan kerja	70.264	77.557	71.838
Bekerja	60.316	66.399	63.899
Mencari kerja	9.948	11.158	7.939
TPAK (%)	68,00	73,00	65,86
TPT (%)	14,16	14,39	11,05

Sumber : BPS Kota Bontang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang pada tahun 2013 tercatat sebesar 65,86 persen. Nilai ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 73,00 persen. Hal itu disebabkan oleh terjadinya penurunan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2013. Meskipun secara keseluruhan jumlah angkatan kerja juga mengalami penurunan, namun kecepatan penurunan jumlah penduduk yang bekerja tidak secepat penurunan jumlah angkatan kerja.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang pada tahun 2013 juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar 14,39 persen di tahun 2012 menjadi sebesar 11,05 persen pada tahun 2013. Angka tersebut mengandung makna bahwa untuk setiap 100 orang penduduk Kota Bontang yang tergolong ke dalam angkatan kerja, terdapat 11—12 orang yang sedang mencari kerja (pengangguran).

Persoalan pengangguran terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, namun hal itu tidak selalu berlaku mutlak. Persoalan pengangguran dapat pula terjadi karena lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, tingkat pendidikan, bahkan jenis kelamin tenaga kerja yang ada.

Oleh sebab itu, selain penambahan lapangan kerja, kesesuaian antara jenis lapangan pekerjaan dengan keterampilan dan jenis kelamin tenaga kerja pun menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator kebijakan adalah dengan tetap melanjutkan pendidikan gratis, sehingga diharapkan dengan makin tingginya kualitas pendidikan masyarakat makin tinggi pula daya saing mereka di dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, dengan lebih banyak lagi mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran. Walaupun tingkat pendidikan formal rendah, namun apabila keterampilan yang dimiliki mumpuni, seseorang masih dapat bekerja. Program lainnya yang dapat mengatasi pengangguran adalah penyediaan kredit yang mudah dan murah, sehingga diharapkan dapat merangsang para pelaku usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Selanjutnya, berdasarkan status pekerjaannya, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu oleh buruh tidak tetap, berusaha dengan dibantu oleh buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga), dan pekerja bebas. Perkembangan persentase

masing-masing kelompok tenaga kerja adalah seperti pada Tabel 16 berikut ini.

**Tabel 16. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Bontang Tahun 2011—2013**

Status Pekerjaan	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	18,53	12,79	20,46
Usaha dengan buruh tidak tetap	9,42	7,84	8,31
Usaha dengan buruh tetap	3,69	4,43	4,15
Buruh/Karyawan/Pegawai	60,32	58,93	56,78
Pekerja tidak di bayar	6,40	14,78	9,38
Pekerja Bebas	1,63	1,23	0,93
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Bontang

Dalam periode tiga tahun terakhir, struktur penduduk bekerja di Kota Bontang didominasi oleh

pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan pola yang agak menurun. Pada tahun 2013 tercatat sekitar 56,78 persen pekerja di Kota Bontang yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Mereka umumnya bekerja di sektor industri pengolahan, pertambangan, dan jasa. Pola menurun dalam tiga tahun terakhir juga terlihat pada proporsi pekerja yang berstatus sebagai pekerja bebas, yaitu para pekerja yang memiliki lebih dari satu orang majikan dalam satu waktu. Sedangkan pekerja tidak dibayar yang umumnya merupakan pekerja keluarga menunjukkan pola yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir, yaitu sekitar 6,40 persen di tahun 2011, naik cukup signifikan menjadi sebesar 14,78 persen pada tahun 2012, dan kembali menurun menjadi sebesar 9,38 persen di tahun 2013. Pekerja keluarga biasanya bekerja pada sektor informal dengan ciri-ciri jumlah jam kerja dan produktifitas rendah.

Sementara itu penduduk yang bekerja dengan cara berusaha, baik berusaha sendiri maupun berusaha dengan dibantu oleh buruh/karyawan menunjukkan pola yang fluktuatif, namun masih sekitar sepertiga dari keseluruhan penduduk bekerja di Kota Bontang. Penduduk berusaha didominasi oleh penduduk yang berusaha sendiri, yaitu mencapai 20,46 persen. Sedangkan penduduk yang berusaha dengan dibantu

oleh buruh tetap dan berusaha dengan dibantu oleh buruh tidak tetap pada tahun 2013 masing-masing sekitar 4,15 persen dan 8,31 persen.

### **3.2.5 GAMBARAN PEREKONOMIAN**

#### **1. PDRB Kota Bontang**

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah. Oleh sebab itu, besaran nilai PDRB suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan faktor produksi dan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Salah satu indikator yang diturunkan dari PDRB adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat bergantung pada jenis lapangan usaha yang beraktivitas di wilayah tersebut. Sebagai kota yang merupakan tempat beroperasinya dua perusahaan besar, yaitu PT. BADAQ dan PT. Pupuk Kaltim, maka perekonomian Kota Bontang sangat didominasi oleh kedua perusahaan itu. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama enam



tahun terakhir, baik dengan migas maupun tanpa migas, disajikan oleh Tabel 17 berikut ini.

**Tabel 17. Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2008—2013**

Tahun	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	74.716.372	6.436.824	0,84	10,36
2009	52.664.325	7.137.928	-3,03	2,61
2010	53.366.144	8.259.068	-3,44	6,76
2011	62.051.947	9.542.631	-8,36	7,31
2012 <sup>r)</sup>	68.481.634	10.956.492	-7,19	6,60
2013 <sup>*)</sup>	69.416.637	12.441.669	-6,40	6,43

r)= Angka Revisi;

\*)= Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Bontang

Selama enam tahun terakhir, nilai PDRB Kota Bontang atas harga berlaku mengalami pola yang tidak tetap, yaitu sempat menurun pada tahun 2009 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2011. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh perubahan jumlah

produksi barang dan jasa, juga dipengaruhi oleh perubahan harga-harga komoditas. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai nilai 69,42 triliun rupiah pada tahun 2013, atau naik sekitar 1,36 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 68,48 triliun. Nilai PDRB Kota Bontang memberi sumbangan sekitar 16,32 persen terhadap nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013. Nilai yang cukup besar ini utamanya disumbang oleh nilai tambah subsektor gas alam cair (LNG) yang merupakan produk utama PT. BADAQ, dan sektor industri pengolahan yaitu komoditas pupuk yang merupakan produk utama PT. Pupuk Kaltim.

Untuk kepentingan analisis, PDRB dapat disajikan dengan migas dan tanpa migas. PDRB tanpa migas dihasilkan dengan cara mengeluarkan komponen minyak dan gas alam pada pertambangan dan industri pengolahan dari penghitungan PDRB. Hal tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah di luar sektor migas. Aktivitas ekonomi Kota Bontang tercatat menghasilkan nilai tambah tanpa migas sebesar 12,44 triliun sepanjang tahun 2013, atau naik sekitar 13,55 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2012. Perbedaan yang cukup besar antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bontang

sangat ditopang oleh sektor migas terutama gas alam cair (LNG). Apabila dilihat peranan Kota Bontang dalam pembentukan PDRB tanpa migas di Provinsi Kalimantan Timur, tercatat PDRB tanpa migas Kota Bontang menyumbang sekitar 4,39 persen, atau jauh lebih rendah dari peranannya dalam pembentukan PDRB dengan migas di Kalimantan Timur. Namun demikian, nilai tambah sektor-sektor non migas Kota Bontang selalu menunjukkan kecenderungan tumbuh positif setiap tahunnya.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, karena nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas. Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang, selalu negatif selama lima tahun terakhir meskipun nilai PDRB atas dasar harga berlakunya selalu meningkat. Pola pertumbuhan ekonomi Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas selama periode 2008—2013 ditunjukkan oleh Grafik 3 di bawah ini.

**Grafik 3. Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2008—2013 (persen)**



Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah produksi barang dan jasa pada periode sebelumnya. Pertumbuhan positif bermakna terjadi kenaikan jumlah produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan negatif menandakan terjadi penurunan produksi barang dan jasa.

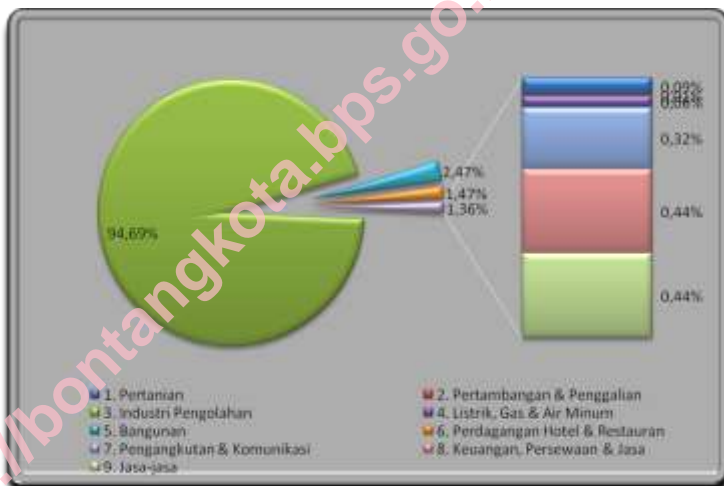
Jika dilihat pertumbuhan PDRB Kota Bontang dengan migas, terlihat bahwa selama enam tahun terakhir terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Terakhir kali Kota Bontang mengalami pertumbuhan ekonomi positif adalah pada tahun 2008, yaitu sekitar 0,84 persen, namun turun menjadi -3,03

persen pada tahun 2009 dan pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2011 yang mencapai -8,36 persen. Hal tersebut terutama disebabkan oleh makin menurunnya produksi gas alam cair oleh PT. BADAQ. Apabila pengaruh sektor migas tersebut dikeluarkan dari nilai PDRB, maka terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kota Bontang selalu positif (meningkat). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 10,36 persen kemudian melambat cukup signifikan sebesar 2,61 persen pada tahun 2009. Selama empat tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kota Bontang cenderung stabil pada rentang 6—7 persen.

Indikator lain yang dapat diturunkan dari besaran PDRB adalah struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi menunjukkan peranan nilai tambah bruto masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai PDRB. Peranan tersebut juga akan berimplikasi pada besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perekonomian Kota Bontang sangat ditopang oleh aktivitas dua perusahaan besar yang ada di kota ini, yaitu PT. BADAQ dan PT. Pupuk Kaltim. Hal tersebut terlihat pada sumbangan sektor Industri Pengolahan yang mencapai 94,69 persen terhadap PDRB Kota Bontang tahun 2013. Angka

tersebut merupakan sumbangan dari subsektor Industri Pengolahan Migas sekitar 82,07 persen dan dari subsektor Industri Pengolahan Tanpa Migas sebesar 12,62 persen. Struktur ekonomi Kota Bontang tahun 2013 ditunjukkan oleh Grafik 4 di bawah ini.

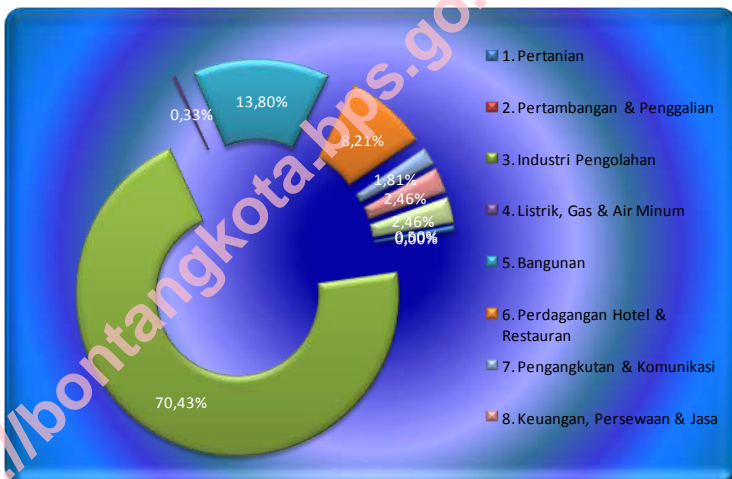
**Grafik 4. Struktur Perekonomian Kota Bontang Dengan Migas Tahun 2013**



Sumbangan terbesar berikutnya diberikan oleh sektor Konstruksi (Bangunan) yaitu sekitar 2,47 persen, diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang mampu berkontribusi sekitar 1,47 persen terhadap keseluruhan nilai tambah bruto yang tercipta di Kota Bontang. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya mampu berkontribusi di bawah 1 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Bontang tahun 2013.

Seperti halnya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi juga dapat dilihat dengan migas dan tanpa migas. Grafik 5 di bawah ini menyajikan distribusi persentase PDRB tanpa migas Kota Bontang yang merupakan struktur ekonomi tanpa migas.

**Grafik 5. Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2013**



Pada Grafik 5 tersebut terlihat bahwa perekonomian Kota Bontang tanpa migas tetap didominasi oleh sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sekitar 70,43 persen. Angka tersebut utamanya merupakan peranan dari subsektor Industri Pupuk yang mencapai 70,26 persen dari keseluruhan PDRB tanpa migas Kota Bontang tahun 2013. Peranan terbesar berikutnya tetap dipegang oleh sektor

Konstruksi yang mampu menyumbang 13,80 persen terhadap PDRB Kota Bontang, yang diikuti oleh sumbangan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yaitu sekitar 8,21 persen. Sisanya sebesar 7,56 persen merupakan sumbangan dari sektor-sektor lain yang masing-masing kontribusinya masih berada di bawah 3 persen terhadap PDRB Kota Bontang tahun 2013.

Indikator berikutnya yang dapat diturunkan dari nilai PDRB adalah PDRB per kapita dan pendapatan per kapita. PDRB per kapita yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun. Sedang pendapatan per kapita diperoleh dari Nilai PDRB yang telah dikurangi faktor penyusutan dan pajak tak langsung neto kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita dengan migas dan pendapatan per kapita dengan migas Kota Bontang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi produksi subsektor Industri Migas, dan kenaikan harga migas terhadap nilai tukar mata uang Dollar Amerika di pasaran internasional. Sebagaimana diketahui, subsektor Industri Gas Alam Cair (LNG) sangat berpengaruh terhadap pembentukan PDRB Kota Bontang.

PDRB per kapita dengan migas Kota Bontang



tahun 2013 tercatat sebesar 445,05 juta rupiah, sedikit menurun apabila dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2012 yang mencapai 450,08 juta rupiah. Sedangkan pendapatan per kapita Kota Bontang pada tahun 2013 adalah sebesar 350,12 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita tertinggi dicapai oleh Kota Bontang pada tahun 2008, yaitu sebesar 559,62 juta rupiah, yang pada saat itu perekonomian Kota Bontang mengalami pertumbuhan positif baik dengan migas maupun tanpa migas. Pada tahun tersebut pendapatan per kapita Kota Bontang tercatat sebesar 468,82 juta rupiah.

Sementara itu, PDRB per kapita tanpa migas dan pendapatan per kapita tanpa migas Kota Bontang terlihat selalu meningkat selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2013 PDRB per kapita adalah sebesar 79,77 juta rupiah dan pendapatan per kapita sebesar 69,72 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat sekitar 10,77 persen pada PDRB per kapita dan sekitar 10,95 persen pada pendapatan per kapita apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## BAB 4

# STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

Manusia merupakan unsur utama dari seluruh kepentingan pembangunan yang menempatkan posisinya pada dua peran yaitu sebagai subyek dan sekaligus juga sebagai obyek pembangunan. Oleh karenanya tuntutan ke arah terciptanya manusia yang berkualitas melalui pendidikan sebagai modal pembangunan pun makin besar. Dengan dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan pembangunan bukan berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut dan mencegah kerusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan bagi manusia.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat

secara bersamaan semua isu dalam masyarakat baik itu tentang pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

## **4.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG**

Dari hasil penghitungan indeks pembangunan manusia Kota Bontang tahun 2013, dapat diketahui secara umum terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam keberhasilan pembangunan manusianya. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, dan faktor yang dominan selama ini adalah dengan diterapkannya otonomi daerah, di mana daerah diberi kewenangan yang luas dalam membangun daerahnya. sehingga tiap daerah dapat menentukan prioritas mana yang harus dibangun terlebih dahulu. Kota Bontang sebagai kota pemekaran juga menerapkan sistem prioritas tersebut. Dari sekian kegiatan pembangunan di Kota Bontang, prioritas masih dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

Pembangunan infrastruktur dalam peranannya terhadap pembangunan manusia adalah secara tidak langsung sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang paling terlihat jelas adalah terbangunnya sarana jalan yang membuka akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dengan terbukanya akses ini pemerintah mengharapkan masyarakat dapat secara aktif menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Jika diukur menggunakan jarak yang ditempuh menuju nilai ideal, maka reduksi shortfall selama kurun waktu 2012–2013 adalah sebesar angka 2,45 persen, atau lebih cepat dibanding kurun waktu 2011—2012 yang sebesar 1,49 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka IPM Kota Bontang mengalami kemajuan yang cukup tinggi, segala upaya pemerintah dalam membangun kualitas manusia di Kota Bontang sudah menunjukkan hasil. Sedangkan untuk peringkat antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang masih bertahan pada peringkat ketiga, sementara posisi pertama dan kedua masih diduduki oleh kota yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Berdasarkan kajian analisis IPM Kota Bontang, jika dilihat dari komponen-komponennya maka yang menguatkan nilai IPM Kota Bontang adalah komponen Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Rata-rata Lama Sekolah. Ketiga indikator ini pada tahun 2013 masih mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2012. Sementara itu komponen pengeluaran riil yang disesuaikan masih tertinggal dari ketiga kota lainnya.

#### **4.1.1 ANGKA HARAPAN HIDUP**

Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu mempresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup (AHH) yang lebih tinggi.

Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, yaitu makin tinggi angka kematian bayi maka makin menurun nilai AHH. Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan

hidup, status sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain.

**Grafik 6. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2012—2013 (tahun)**



Grafik 6 di atas menunjukkan angka harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Terlihat bahwa angka harapan hidup Kota Bontang menempati urutan ketiga tertinggi di bawah Kabupaten Paser dan Kabupaten Bulungan. Angka harapan hidup Kota Bontang mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin dari sebesar 72,78 tahun pada tahun 2012 menjadi sebesar 73,12 tahun pada tahun 2013. Angka tersebut masih berada di atas angka harapan hidup

Provisi Kalimantan Timur yang sebesar 71,78 pada tahun 2013. Pembangunan yang dilakukan Kota Bontang dalam mewujudkan Bontang Sehat dengan memberikan fasilitas pengobatan gratis ikut mendongkrak kenaikan nilai komponen angka harapan hidup. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kualitas hidup penduduk Kota Bontang relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Upaya penurunan mortalitas perlu dilakukan seiring dengan usaha pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian penanganan masalah demografi sepatutnya ditempatkan sebagai isu sentral dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi, baik untuk kesehatan, pendidikan, perumahan maupun perluasan kesempatan kerja. Hal itu diupayakan sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

#### **4.1.2 ANGKA MELEK HURUF**

Proses pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan

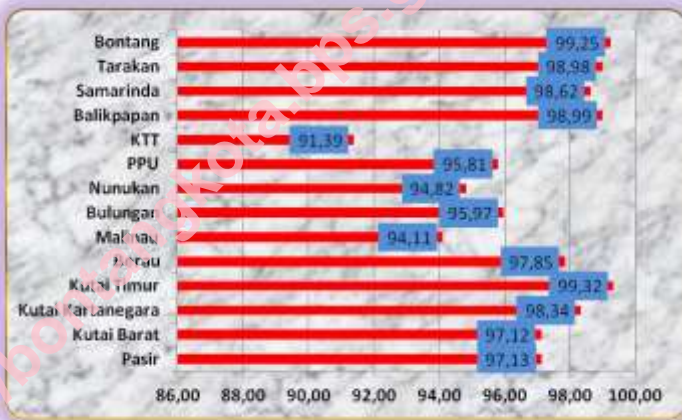
keterampilan sebagai bekal untuk berperan dan berinteraksi dengan masyarakat. Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan tersebut penting bagi seseorang sebagai sarana untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peluang orang tersebut untuk mendapatkan atau menciptakan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik demi menunjang kesejahteraannya. Kemampuan membaca dan menulis dapat diukur dengan angka melek huruf, yang merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

Pada tahun 2013 Angka Melek Huruf (AMH) Kota Bontang mencapai 99,25 yang artinya sebanyak 99,25 persen penduduk Kota Bontang yang berusia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya. Dengan kata lain, hanya sekitar 0,75 persen saja penduduk Kota Bontang yang belum bisa membaca dan menulis. Angka ini membaik jika dibandingkan dengan angka melek huruf tahun 2012 yang sebesar 99,22 persen. Penduduk yang belum melek huruf diperkirakan



adalah penduduk berusia lanjut yang memiliki peluang cukup kecil untuk belajar membaca dan menulis. Perbandingan angka melek huruf kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diperlihatkan oleh Grafik 7 di bawah ini.

**Grafik 7. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2013 (persen)**



Di antara kabupaten/kota lainnya, Kota Bontang masih menempati urutan kedua teratas dalam angka melek huruf, satu tingkat di bawah Kabupaten Kutai Timur. Meskipun angka melek huruf penduduk Kota Bontang telah mencapai angka ideal yaitu di atas 90 persen, namun belum berarti tugas pemerintah telah usai. Terdapat tantangan baru yaitu untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi

tersebut. Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan telah dicanangkan program Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 12 tahun sejak tahun 2004. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan di Kota Bontang.

Di tingkat regional khususnya di Kota Bontang selain dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, untuk menambah tingkat kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah kota juga memberikan honor tambahan bagi tenaga pendidik dan administrasi di semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk taman kanak-kanak. Selain memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah juga serius dalam menangani bidang pendidikan yaitu dengan dibebaskannya SPP dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Dan juga adanya pemberian beasiswa pendidikan, baik dari Pemerintah Kota maupun dari organisasi non pemerintah seperti PT.Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim kepada pegawai pemerintah daerah dan masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan dampak yang luas bagi percepatan peningkatan sumber daya manusia.

### **4.1.3 RATA-RATA LAMA SEKOLAH**

Di samping kemampuan dasar membaca dan menulis, diperlukan suatu indikator lain yang dapat mewakili tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Makin lama seseorang mengenyam bangku sekolah diharapkan makin baik keterampilan yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah. Ukuran tersebut memberikan sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Pada tahun 2013 rata-rata lama bersekolah Kota Bontang mencapai angka 10,45 tahun, yang mengandung makna bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga kelas sepuluh atau kelas dua Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA selama lebih dari 1 tahun. Perbandingan rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disajikan oleh Grafik 8 di bawah ini.

**Grafik 8. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2013 (Tahun)**



Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata lama sekolah Kota Bontang mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin. Namun peningkatan itu belum mampu menyalip capaian Kota Balikpapan yang sekitar 10,49, sehingga Kota Bontang masih harus berpuas diri berada di posisi kedua seperti tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang tahun lalu pun masih jauh lebih tinggi dari pada capaian kabupaten/kota lain di tahun tahun 2013. Tentu saja hal ini merupakan suatu prestasi yang cukup menggembirakan dan menjadi suatu modal positif bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang.

Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

#### **4.1.4 RATA-RATA PENGELUARAN RIIL**

Rata-rata pengeluaran riil merupakan indikator dengan perkembangan paling cepat apabila dibandingkan dengan indikator pembangunan manusia lainnya. Jika dibandingkan dengan tiga kota lainnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Tarakan, rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang masih tertinggal, seperti terlihat pada Grafik 9. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh variasi konsumsi masyarakat yang umumnya masyarakat pinggiran (pantai) yang kurang sesuai dengan rekomendasi UNDP terhadap 27 komoditas yang disesuaikan sampai dengan tahun 2018. Ke depannya, langkah intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Mendekatkan pemukiman pada akses pasar (komoditas) yang berada di sekitarnya sehingga mudah dijangkau.
2. Memberikan tambahan keterampilan pemenuhan variasi asupan keluarga.
3. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan yang berimplikasi pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

**Grafik 9. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2013 (000 Rupiah)**



Namun demikian, rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 tercatat rata-rata pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Bontang adalah sebesar 639.880 rupiah, kemudian meningkat

sekitar empat ribu rupiah pada tahun 2013 menjadi 643.880 rupiah. Peningkatan pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, terutama kondisi perekonomian secara global, seperti peningkatan harga bahan kebutuhan pokok baik bahan makanan maupun non bahan makanan, peningkatan jumlah penduduk, dan lain-lain. Selain itu peningkatan pengeluaran juga bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan penduduk, sehingga mereka tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi sudah mulai memikirkan kebutuhan sekunder dan tersier.

Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan merupakan ukuran kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan masalah pendapatan tentunya berhubungan dengan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat, variabel subkomponen pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Produktivitas, PDRB per kapita.
- b. Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi.
- c. Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sektor sekunder.
- d. Status pekerjaan.

Variabel di atas sangat dominan dalam mempengaruhi pendapatan yang pada tahap selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, variabel-variabel di atas termasuk subvariabel yang eksis dalam mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, sehingga sebaiknya mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh komponen pendapatan merupakan komponen yang sangat rawan dalam melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan, kecemburuan sosial serta masalah pengangguran dan kemiskinan. Daya beli ini ditekankan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan paket komoditas yang disesuaikan dengan kebutuhan di DKI Jakarta (lihat tabel 3). Perkembangan masing-masing komponen pembentuk Indeks Pembangunan (IPM) Kota Bontang selama empat tahun terakhir disajikan oleh Tabel 19 di bawah ini.



**Tabel 19. Indikator Pembangunan Manusia Kota Bontang, Tahun 2010—2013**

<b>Indikator</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Angka harapan hidup (tahun)	72,42	72,60	72,78	73,12
2. Angka melek huruf (%)	99,20	99,21	99,22	99,25
3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,04	10,38	10,40	10,45
4. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (rupiah)	633.430	636.970	639.880	643.880
<b>IPM</b>	76,88	77,52	77,85	78,40
<b>Peringkat Provinsi</b>	3	3	3	3
<b>Peringkat Nasional</b>	-	-	-	-
<b>Reduksi Shortfall</b>	1,55	2,75	1,49	2,45

*Sumber : BPS Kota Bontang*

## **4.2 PERKEMBANGAN IPM 10 TAHUN TERAKHIR**

Sejalan dengan perkembangan masing-masing komponen pembentuknya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang selama sepuluh tahun terakhir pun

mengalami kecenderungan yang positif setiap tahunnya. Di tahun 2004 tercatat IPM Kota Bontang menyentuh angka 74,70, kemudian naik menjadi 74,90 pada tahun 2005, dan terus meningkat hingga menyentuh angka 77,85 pada tahun 2012 dan 78,40 pada tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di Kota Bontang cukup berhasil. Pola perkembangan IPM Kota Bontang secara lebih jelas diperlihatkan oleh Grafik 10 di bawah ini.

**Grafik 10. Perkembangan IPM Kota Bontang, Tahun 2004—2013 (tahun)**



### 4.3 KECEPATAN MENCAPAI ANGKA IPM IDEAL (REDUKSI *SHORTFALL*)

Nilai ideal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah adalah 100 persen. Sehingga segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM pada hakikatnya adalah untuk mendekati angka ideal tersebut. Kecepatan perkembangan nilai IPM menuju nilai ideal dapat diukur dengan suatu indikator yang disebut reduksi *shortfall*. Tabel 20 di bawah ini menyajikan perbandingan reduksi *shortfall* IPM kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2013.

**Tabel 20. Perbandingan Reduksi *Shortfall* IPM Kabupaten/Kota, Tahun 2013**

Kabupaten/Kota	IPM		Reduksi Shortfall
	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pasir	75,85	76,56	2,65
Kutai Barat	74,05	74,61	2,14
Kutai Kartanegara	74,24	74,80	2,18
Kutai Timur	73,75	74,23	1,84
Berau	75,05	75,83	3,11
Malinau	73,63	74,33	2,65

Kabupaten/Kota	IPM		Reduksi Shortfall
	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)
Bulungan	76,03	76,31	1,17
Nunukan	74,84	75,13	1,12
Penajam PU	74,35	74,82	1,81
Tana Tidung	72,66	73,20	1,99
Balikpapan	79,38	79,87	2,36
Samarinda	78,26	78,79	2,45
Tarakan	77,76	78,07	1,42
Bontang	77,85	78,40	2,45
Kalimantan Timur	76,71	77,33	2,65

Sumber : BPS Kota Bontang

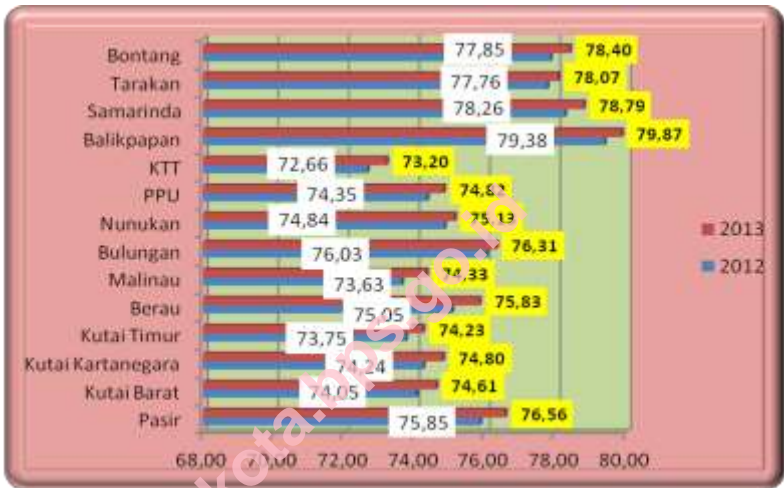
Tingkat kecepatan perkembangan IPM Kota Bontang menuju angka IPM ideal (100 persen) dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebesar 2,45 persen. Nilai tersebut sedikit lebih rendah dari kecepatan perkembangan IPM yang diraih oleh Kabupaten Berau (3,11) dan kecepatan perkembangan IPM Kabupaten Paser dan Kabupaten Malinau (2,65). Reduksi *shortfall* yang diraih oleh Kota Bontang pada tahun 2013 menyamai pencapaian Kota Samarinda yang

merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentu saja merupakan kondisi yang cukup menggembirakan mengingat pada tahun sebelumnya reduksi *shortfall* IPM Kota Bontang sempat tertinggal apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun demikian, tentu saja hal itu tidak boleh membuat Kota Bontang terlalu cepat berpuas diri.

#### **4.4 KETERBANDINGAN IPM ANTAR KAB/KOTA DI PROVINSI KALTIM DAN KALTARA**

Secara umum tidak terjadi perubahan peringkat yang signifikan dalam susunan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2013 apabila dibandingkan dengan peringkat pada tahun 2012. Empat peringkat teratas masih diduduki oleh kabupaten/kota yang sama, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, dan Kota Tarakan. Terdapat empat kabupaten/kota yang mengalami perubahan peringkat di tahun 2013, yaitu Kabupaten Pasir dan Malinau yang masing-masing naik satu peringkat, dan Kabupaten Kutai Timur dan Bulungan yang masing-masing turun satu peringkat. Perbandingan IPM kabupaten/kota selama dua tahun terakhir digambarkan oleh Grafik 11 berikut ini.

**Grafik 11. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tahun 2012—2013**



Secara rata-rata dari 14 kabupaten/kota, angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 71,78 tahun. Angka harapan hidup tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pasir yaitu 73,99 tahun, sedangkan angka harapan hidup terendah dicapai oleh Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 68,39 tahun. Sementara itu angka harapan hidup Kota Bontang masih bertahan di posisi ketiga di antara seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yaitu sebesar 73,as tahun. Dengan capaian ini, angka harapan hidup Kota Bontang telah melampaui angka harapan hidup Kalimantan Timur sebesar 1,35 tahun, melebihi jarak tahun lalu yang sekitar 1,2 tahun.

Sedangkan jika dilihat komponen Angka Melek Huruf (AMH), rata-rata 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan angka melek huruf sebesar 97,95 persen. Angka melek huruf Kota Bontang pada tahun 2013 menempati peringkat kedua di antara 14 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan nilai sebesar 99,25 persen, satu peringkat di bawah Kabupaten Kutai Timur yang meraih nilai angka melek huruf sebesar 99,32 persen. Sementara itu urutan terakhir diduduki oleh Kabupaten Tana Tidung dengan raihan nilai angka melek huruf sebesar 91,39 persen.

Selanjutnya, komponen rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 adalah sebesar 9,39 tahun, atau sudah melebihi target pendidikan dasar 9 tahun. Posisi empat besar ditempati oleh daerah yang berstatus kota dengan rata-rata penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SLTA. Rata-rata lama sekolah penduduk yang selama 10,45 tahun telah membawa Kota Bontang menduduki peringkat kedua di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggal satu peringkat dari Kota Balikpapan yang berada di posisi puncak dengan rata-rata lama sekolah selama 10,49 tahun. Kabupaten Nunukan masih belum bergeser dari posisi kunci dengan rata-rata lama sekolah penduduknya selama 7,57 tahun. Dengan kata lain, rata-rata tingkat

pendidikan penduduk Kabupaten Nunukan adalah sapa pada kelas 2 SLTP.

Berikutnya pada komponen pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan atau Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity = PPP*), memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menaikkan atau menurunkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di DKI Jakarta. Pada Tabel 21 di bawah terlihat bahwa nilai PPP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 653.700 rupiah. Nilai PPP tertinggi di Kalimantan Timur pada tahun 2013 masih dicapai oleh Kota Balikpapan yaitu sebesar 665.610 rupiah, diikuti oleh Kota Samarinda sebesar 660.080 rupiah dan Kabupaten Malinau serta Kota Tarakan masing-masing sebesar 656.740 dan 656.270 rupiah. Sedangkan Kota Bontang masih tetap menempati urutan ke-9 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dengan nilai PPP sebesar 643.880 rupiah. Nilai PPP terendah diraih oleh Kabupaten Tana Tidung, yaitu sebesar 628.590 rupiah. Perbandingan nilai masing-masing komponen pembentuk IPM seluruh



kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada tahun 2013 ditampilkan oleh Tabel 21 berikut ini.

**Tabel 21. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Dirinci menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013**

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita riil disesuaikan (Rp)	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pasir	73,99	97,13	8,35	640.090	76,56	5
Kutai Barat	70,63	97,12	8,43	638.130	74,61	11
Kutai Kartanegara	68,39	98,34	8,89	648.890	74,80	10
Kutai Timur	69,17	99,32	8,63	635.610	74,23	13
Berau	70,73	97,85	8,82	647.450	75,83	7
Malinau	68,62	94,11	8,54	656.740	74,33	12
Bulungan	73,32	95,97	8,24	646.030	76,31	6
Nunukan	72,01	94,82	7,57	649.910	75,13	8
Penajam PU	71,94	95,81	7,82	641.130	74,82	9
Tana Tidung	72,76	91,39	7,65	628.590	73,20	14
Balikpapan	72,81	98,99	10,49	665.610	79,87	1
Samarinda	71,92	98,62	10,38	660.080	78,79	2

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita riil disesuaikan (Rp)	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tarakan	72,19	98,98	9,50	656.270	78,07	4
Bontang	73,12	99,25	10,45	643.880	78,40	3
Kalimantan Timur	71,78	97,95	9,39	653.700	77,33	-

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

<http://bontangkota.bps.go.id>

# BAB 5

## PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

Prinsip pembangunan manusia adalah azas pemerataan yang diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan terjadi peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk yang diperoleh melalui proses pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan manusia sebagai subsistem pembangunan diharapkan dapat menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan masyarakat. Makin beragam kegiatan masyarakat makin besar pula kemampuan mereka dalam mengembangkan pilihan-pilihannya. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia akan dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui kemampuan mengelola sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dijadikan sebagai salah satu ukuran utama dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yakni menjadi kunci bagi

terlaksananya perencanaan pembangunan daerah. Pertimbangan lain adalah IPM dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai alat ukur pemantauan status pembangunan manusia, karena IPM sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan hak dalam pembangunan manusia selaras dengan pengembangan dan prakarsa Strategi Penghapusan Kemiskinan (Bebas Kemiskinan) atau Program Strategi Penghapusan Kemiskinan Nasional (SPKN) di tingkat Nasional, dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Milenium (MDGs)

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2013 adalah:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia atau status tiga kemampuan dasar penduduk, yakni berumur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengalaman dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.
2. Selama periode 2012-2013 secara rata-rata pembangunan manusia di Kota Bontang mengalami peningkatan dengan tingkat status berada pada

posisi menengah atas, tingkat status yang sama dengan tahun sebelumnya, namun dalam nilai yang lebih tinggi yaitu 78,40.

3. Pada tahun 2013 seluruh komponen IPM Kota Bontang mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2012. Komponen angka harapan hidup meningkat sebesar 0,34 poin, komponen angka melek huruf meningkat sebesar 0,03 poin, komponen rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,05 poin, dan pengeluaran per kapita disesuaikan naik sebesar 4 ribu poin.
4. Peningkatan angka harapan hidup di Kota Bontang menunjukkan taraf kesehatan penduduk Kota Bontang yang makin baik. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jamkesda dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara dini.
5. Di bidang pendidikan, angka melek huruf Kota Bontang mencapai nilai sebesar 99,25 persen. Angka ini mengandung makna bahwa dari seluruh penduduk Kota Bontang berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 99,22 persen di antaranya tidak lagi buta huruf. Angka ini memang cukup memuaskan dan telah mencapai angka ideal yaitu di atas 90 persen.

Hal tersebut dapat terwujud antara lain karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Bontang yang membebaskan biaya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat SLTA. Implikasi lainnya adalah rata-rata lama sekolah Kota Bontang yang terus meningkat hingga mencapai 10,45 tahun pada tahun 2013. Dengan kata lain, secara rata-rata penduduk Kota Bontang melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selama 1 tahun lebih 5 bulan.

6. Di bidang ekonomi juga terjadi peningkatan pendapatan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Hal itu dapat dilihat pada kenaikan rata-rata pengeluaran riil per kapita. Pada Tahun 2012 rata-rata pengeluaran riil per kapita Kota Bontang adalah sebesar 639.880 rupiah, kemudian meningkat menjadi 643.880 rupiah di tahun 2013.
7. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang di tahun 2013 meningkat sebesar 0,54 poin dari tahun lalu sehingga mencapai nilai 78,40.

## **5.2 SARAN**

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi

daerah memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, termasuk keleluasaan dan kewenangan dalam pembelanjaan anggaran. Kesempatan ini diberikan kepada DPRD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota.

Upaya desentralisasi tersebut membangkitkan kekhawatiran bahwa pemerintah daerah akan mengabaikan pembangunan sosial jangka panjang karena mereka akan cenderung untuk mengarahkan perhatian pada kegiatan ekonomi jangka pendek yang menghasilkan uang. Oleh karenanya, pemanfaatan konsep pembangunan manusia sebagai alat advokasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadi sangat penting.

Salah satu cara menjamin bahwa desentralisasi akan berjalan untuk kepentingan semua rakyat adalah dengan membuat kesepakatan sosial baru (*new social compact*), suatu kesepakatan bahwa semua warga negara Indonesia berhak atas suatu standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan nasional. Misalnya, mereka berhak untuk bisa membaca dan menulis, berhak untuk hidup sehat, berhak untuk bisa mendapat penghasilan yang layak, dan berhak untuk mendapat rumah yang memadai.

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang sangat luas melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk mencapai kesetaraan jender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, untuk bisa membaca dan menulis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lain pihak mempunyai cakupan yang lebih sempit. Meskipun IPM mencoba untuk mengukur tingkat pembangunan manusia, indeks ini hanya mampu mengukur sebagian saja. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek seperti tingkat partisipasi masyarakat atau kesehatan mental sangat sulit untuk diukur dan dikumpulkan datanya.

Oleh karenanya pihak daerah harus lebih memfokuskan diri pada konsep pembangunan manusia secara luas serta penerapan prinsip-prinsip utamanya, daripada hanya memfokuskan pada indeks semata. Artinya, dalam setiap aspek pekerjaannya, pejabat dan pegawai daerah harus mengutamakan manusianya dengan meletakkan manusia bukan sebagai alat pembangunan tetapi sebagai tujuan utama dari pembangunan. Misalnya, daripada meningkatkan pendidikan dan menjaga kesehatan masyarakat hanya untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih baik atau untuk meningkatkan perekonomian, selayaknya pejabat dan pegawai daerah membantu masyarakat di



daerahnya untuk menjalankan kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan. Oleh karena itu, semua kegiatan mulai dari pembangunan jalan, pemberian lisensi penambangan, atau pembangunan fasilitas kesehatan baru harus bertujuan untuk memperluas kesempatan dan pilihan yang dimiliki masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, namun tidak berarti anti pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Dalam jangka pendek, dengan pengeluaran publik yang teratur, suatu daerah dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan manusia, meskipun tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti. Meskipun parameter pembangunan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai arti penting bagi pembangunan manusia, namun dalam jangka panjang tidak akan ada kemajuan yang berkelanjutan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi.

Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya

masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang seperti apa. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas pertumbuhan tersebut, sehingga dapat menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian utama dari kebijakan pembangunan haruslah ditekankan pada bagaimana keterkaitan tersebut dapat diciptakan dan diperkuat.



**D A T A**

**Mencerdaskan Bangsa**



**Badan Pusat Statistik Kota Bontang**

Jl.Awang Long,No.2 Bontang-Kaltim

Telp.0548-26066,Fax.0548-27706

email : [bps6474@bps.go.id](mailto:bps6474@bps.go.id)

<http://bontangkota.bps.go.id>